



News Title : Bappebti Genjot Penyusunan Permendag PLK, Peraturan yang Bakal Untungkan Petani Dkk

Media Name : Tribunnews.com

Journalist : Endrapta Ibrahim Pramudhiarz

Publish Date : 09 October 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Heryono Hadi Prasetyo (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Bisnis

Topic : Kolaborasi Pengembangan Ekosistem PLK

Home | Bisnis | Industri

Bappebti Genjot Penyusunan Permendag PLK, Peraturan yang Bakal Untungkan Petani Dkk

Seri, 9 Oktober 2023 13:05 WIB
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiarz
Editor: Hendri Gusawan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiarz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) pasar barang komoditas (PLK).

Kepala Bappebti **Didid Noordiatmoko** mengatakan, penguatan standar regulasi PLK diperlukan untuk mewujudkan beberapa hal.

Diantaranya, memfasilitasi terwujudnya PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan berjangka komoditas yang akan menggarap urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Wilmar Ajak Petani Sidoarjo Hidupkan 6 Hektare Lahan Tidur

Instrumen PLK dibutuhkan untuk mendapatkan harga yang adil dan transparan bagi petani, nelayan, peternak, dan masyarakat kecil serta memajukan industri di dalam negeri.

"Untuk itu, perlu dipadatkan mekanisme perdagangan berjangka komoditas serta memberikan perlindungan masyarakat," kata Didid dalam acara diskusi di Bali, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).

Adapun dasar penyusunan Permendag Pengembangan PLK adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK.

Kementerian Perdagangan diamanahkan menyusun peraturan turunan atas Perpres 75/2022 Permendag.

"Permendag akan mengatur Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan substansi teknis implementasi PLK, sebagaimana tertuang dalam Perpres tersebut," kata Didid.

Ia menjelaskan, komoditas Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi 'tuan' di negeri sendiri.

Menurut dia, harga belum berpihak pada nelayan, petani, peternak yang merupakan penghasil komoditas.

Baca Juga: Bertemu Petani Loharkota, Ganjen: Setiap Keluarga Bisa Berdulang Pangan

Ditah karena itu, Bappebti harus seimbang dalam mengatur petani, nelayan, peternak, masyarakat kecil serta pelaku industri.

"Dengan semangat itu Bappebti berusaha melakukan percepatan penyusunan Rancangan Permendag PLK agar instrumen ini berkontribusi lebih nyata dalam rantai perdagangan komoditas di Indonesia," kata Didid.

Namun, kata dia, upaya tersebut tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dan mengelola ekosistem PLK dan sistem nilai gudang (SRG).

"Terseleenggaranya PLK saja tidak cukup, harus berdampak lebih baik pada kesejahteraan masyarakat," ujar Didid.

Substansi Rancangan Permendag PLK

Beberapa isu strategis substansi Rancangan Permendag PLK, diantaranya mengenai jenis PLK, pengaturan mekanisme pembinaan/ pengembangan PLK, kelembagaan, dan peningkatan keenergan pembinaan/ pengembangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Kemudian, mengenai sinergitas kebijakan/ program antara pemerintah pusat dan daerah, potensi perdagangan komoditas melalui sinergi PLK dengan SRG, dan pemetaan komoditas strategis untuk diperdagangkan melalui PLK.

Selain itu, Rancangan Permendag PLK juga akan mengatur pasar barang spot dan forward yang melibatkan banyak penjual dan pembeli.

Terakhir, Rancangan Permendag PLK akan menghausbukan penyelenggara barang komoditas mendapatkan izin dari Bappebti dan pengawasan PLK juga menjadi perhatian dalam rancangan peraturan itu.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Heryono Hadi Prasetyo mengatakan, Rancangan Permendag PLK akan mengatur juga mutu komoditas dan grading komoditas yang akan diperdagangkan.

"Integrasi PLK dengan SRG akan didorong sebagai akses pasar komoditas yang disimpan di gudang SRG," katanya.

Komoditas yang ditransaksikan melalui PLK termasuk standar mutunya akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari K/L, Pemda, Asosiasi, dan Pelaku